

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sanitasi merupakan salah satu tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan yang tercantum pada Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030 tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan indikator 6.2 yang menargetkan pada tahun 2030 Indonesia mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan (Bappenas, 2020). Target itu dicapai dengan membuat rencana kerja yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 0 % Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (Republik Indonesia, 2020)

Berdasarkan data WHO (*World Health Organization*) Pada tahun 2020, 54% populasi global (4,2 miliar orang) menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman; 34% (2,6 miliar orang) menggunakan fasilitas sanitasi pribadi yang terhubung ke saluran pembuangan tempat pengolahan air limbah; 20% (1,6 miliar orang) menggunakan toilet atau jamban di mana kotoran dibuang dengan aman di tempat; dan 78% populasi dunia (6,1 miliar orang) menggunakan setidaknya layanan sanitasi dasar, sedangkan rumah tangga di Indonesia yang mempunyai akses sanitasi layak pada tahun 2021 sebesar 80,29% dan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 95,17 % (BPS, 2021b), hal ini mengindikasikan masih ada rumah tangga yang masih belum layak sanitasi di DKI Jakarta sebesar 4,83%.

Selaras dengan tujuan SDGs 2015-2030 tersebut yang merupakan kelanjutan dari MDGs (*Millenium Development Goals*) yang telah berakhir pada tahun 2015, pemerintah bersama program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM melakukan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemukiman.

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Kemenkes RI, 2014). Salah satu pilar STBM, yaitu pilar pertama adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) menjadi focus utama dan urgensi yang mendasari penelitian ini diantaranya adalah kotoran manusia/tinja yang tidak dikelola sesuai standar atau dibuang sembarangan merupakan sebuah media penularan penyakit karena selain dapat mencemari dan mengkontaminasi sumber air kemudian menjadi penyebab *waterborne disease* atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dalam air, serta terjadinya pencemaran ulang (rekontaminasi) pada sumber air dan makanan baik secara langsung maupun tidak, tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit berbasis lingkungan juga menjadi permasalahan kesehatan masyarakat, salah satu nya adalah kasus diare, di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat 12.664 kasus Diare (BPS, 2021b) salah satu penyebabnya adalah perilaku buang air besar sembarangan yang terjadi karena Akses Sanitasi yang belum Optimal, sedangkan kasus Diare Jakarta Barat berjumlah 3.148 pada tahun 2021 (BPS, 2021a), diare dan *Environmental Enteropathy* ini atau gangguan usus yang terjadi pada kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan sanitasi buruk juga merupakan salah satu penyebab tingginya kejadian malnutrisi bada anak balita yang mengakibatkan *stunting*, kondisi ini harus dicegah agar kualitas generasi penerus bangsa memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya adalah dari 267 Kelurahan di DKI Jakarta, hanya 40 Kelurahan (14.98 %) yang sudah mendeklarasikan sebagai Kelurahan SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) pada tahun 2021 (Sudinkes Jakarta Barat, 2021) hal ini tidak sejalan dengan Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang secara massif sudah digalakkan sejak tahun 2017.

Kota Administrasi Jakarta Barat yang memiliki luas wilayah 129,5 KM persegi dengan 8 kecamatan dan 56 kelurahan sampai dengan tahun 2021 hanya memiliki 10 Kelurahan yang sudah melakukan deklarasi SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) atau 17,8% dengan jumlah KK atau Rumah Tangga 637.699 KK dan kepadatan penduduk 19.592 jiwa per kilometer persegi (Sudinkes Jakarta

Barat, 2022). Kondisi jamban di Kota Administrasi Jakarta Barat diantaranya jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) 69%, Jamban Sehat Semi Permanen (JSPP) 8%, Jamban *Sharing* (JS)/Komunal 18% dan KK yang masih buang air besar sembarangan secara tertutup (memiliki kloset namun tidak memiliki pengolahan limbah lanjutan) mencapai 5%, sedangkan untuk data perwilayah status kelurahan SBS tertinggi pada Kecamatan Kembangan dan Tambora, yang masing-masing telah mempunyai 3 Kelurahan SBS dan wilayah yang belum memiliki Kelurahan SBS yaitu Kecamatan Cengkareng dan Palmerah, namun dari 2 kecamatan tersebut, Kecamatan Palmerah yang memiliki sanitasi layak terendah yaitu 91%, sedangkan Kecamatan Cengkareng memiliki akses sanitasi layak sebesar 97%, 4 kelurahan sisanya masing-masing telah memiliki 1 Kelurahan SBS yaitu pada Kecamatan Tamansari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk dan Kalideres. Kegiatan yang telah dilakukan semenjak tahun 2017 adalah Sosialisasi, Pemicuan, Verifikasi dan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), deklarasi Stop Buang Air Besar bisa terealisasi setelah proses verifikasi tidak ditemukan lagi perilaku buang air besar sembarangan di suatu desa/kelurahan (Sudinkes Jakarta Barat, 2021).

Puskemas Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki wilayah kerja 6 (enam) kelurahan, dengan jumlah KK 50.675 atau 231.946 jiwa, dengan jumlah bangunan 40.357 bangunan, sampai dengan tahun 2022 sudah 100% dilakukan sosialisasi, pemicuan dan verifikasi SBS, namun masih terdapat 9% KK atau 4.438 KK yang masih melakukan buang air besar sembarangan dan dari 6 (enam) kelurahan tersebut belum ada yang melakukan deklarasi SBS. Kondisi jamban di Kecamatan Palmerah diantaranya jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) 73%, Jamban Sehat Semi Permanen (JSPP) 0%, Jamban *Sharing* (JS)/Komunal 18% (Sudinkes Jakarta Barat, 2021). Ditinjau dari data-data tersebut dan berdasarkan hasil wawancara penanggung jawab kesehatan lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat pada penelitian pendahuluan masalah terjadi pada proses pengawasan dan pengendalian pasca pemicuan pada rangkaian kegiatan stop buang air besar sembarangan (Sudinkes Jakarta Barat, 2021). Pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara terpadu bersama lintas sektor dan lintas program sudah berjalan sejak tahun 2017, dengan cara sosialisasi

yang dilakukan setiap bulan di kegiatan kelurahan maupun kecamatan, turun ke lapangan bersamaan dengan kegiatan PSN atau kerja bakti dan monitoring dan evaluasi program STBM yang dilakukan setiap triwulan, namun karena rendahnya kesadaran dan penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum, sehingga sampai dengan tahun 2021, Kecamatan Palmerah belum mempunyai Kelurahan SBS. Hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Ahmadi (2019) menunjukkan bahwa faktor pendukung program STBM yaitu dukungan dan komitmen birokrasi pemerintah dan masyarakat. Faktor penghambat program yaitu akses informasi masyarakat terhadap program mekanisme pengawasan, dan keterbatasan ekonomi masyarakat (Muaja et al., 2020)

Strategi nasional STBM berdasarkan Permenkes 3 Tahun 2014 ada 3 (tiga) diantaranya, penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*), peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*), peningkatan penyediaan akses sanitasi (*supply improvement*). Apabila salah satu dari komponen STBM tersebut tidak ada maka proses pencapaian 5 (lima) Pilar STBM tidak maksimal. Tiga strategi ini disebut Komponen Sanitasi Total.

Stop Buang Air Besar Sembarangan menjadi pilar pertama dalam STBM, adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit atau kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak buang air besar di sembarang tempat, tetapi di sarana jamban sehat. Jamban sehat adalah sarana pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit, yang memiliki indikator perilaku berupa jumlah dan presentase penduduk tidak buang air besar sembarangan 100%, dan indikator pencapaian terkait akses ada 2 indikator yaitu jumlah presentase rumah tangga menggunakan sarana jamban sehat dan jumlah desa/kelurahan di kabupaten yang mencapai SBS dicek ulang setiap tahun setelah deklarasi SBS 100% (Kemenkes RI, 2012).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Pertama Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data profil Puskesmas Kecamatan Palmerah tahun 2021, diketahui bahwa dari 6 kelurahan di wilayah Puskesmas Kecamatan Palmerah telah melakukan pemucuan dengan cakupan 100%, untuk sarana sanitasi layak atau jamban sehat sebanyak 91% yang digunakan oleh 50.675 KK pengguna dengan Kondisi jamban di Kecamatan Palmerah diantaranya jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) 73%, Jamban Sehat Semi Permanen (JSPP) 0%, Jamban *Sharing* (JS)/Komunal 18%, dan kelurahan SBS yaitu 0% atau belum ada kelurahan yang berstatus SBS. Masalah terjadi pada pasca pemucuan masyarakat, terutama pada faktor ekonomi dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya buang air besar di jamban sehat, sehingga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang baik, Berdasarkan data tersebut peneliti merasa tertarik ingin meneliti tentang “Efektivitas program STBM Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah”.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana Efektivitas program STBM Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah?
- 1.3.2. Bagaimana gambaran perencanaan dalam pelaksanaan program program STBM Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah?
- 1.3.3. Bagaimana gambaran pelaksanaan program STBM Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah?
- 1.3.4. Bagaimana gambaran pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pada program STBM Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Mengetahui Efektivitas program STBM Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran perencanaan program STBM Pilar 1 Stop Buang Air

- Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah
2. Mengetahui gambaran pelaksanaan program STBM Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah
 3. Mengetahui gambaran pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pada program STBM Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah

1.5. Manfaat Penulisan

1.5.1. Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan Efektivitas program STBM Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah

1.5.2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru terkait pelaksanaan STBM serta melengkapi penelitian yang sudah ada.

1.5.3. Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sekaligus bahan evaluasi Pelaksanaan Program.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Pertama Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Penelitian ini dilakukan karena dari 6 kelurahan di Kecamatan Palmerah, belum satupun yang mendeklarasikan SBS (Stop Buang air besar Sembarangan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif sarannya adalah kepala Puskesmas Kecamatan Palmerah, petugas sanitarian Puskesmas Kecamatan Palmerah, *stakeholder* terkait dan masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Palmerah. Dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen.